

3.1. Daftar Pustaka

Buku

Alston, Philip & Suseno, Franz Magnis, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015.

Fakhturohman, Aminudin, Dian., & Sirajuddin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Manan, Bagir, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2006.

Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.

Artikel dan Sumber Pustaka Lain

Wasis Sutetio, *Legal Reasoning atau Penalaran Hukum*, disampaikan dalam Pelatihan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Ditjen PP Kementrian Hukum dan HAM.

Jurnal

Dwi Prilmilono Adi, *Penalaran Hukum Dalam Kritik Ilmu*, Jurnal Hukum Jatiswara, Volume 3 Nomor 3, November (2015).

I Nyoman Nurjaya, *Penalaran Hakim Dalam Menciptakan Hukum (Judge-Made-Law); Suatu Kegiatan Berpikir Ilmiah*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 13 Nomor 4, Juli (1983).

Nanang Sri Darmadi, *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum, Volume 26 Nomor 2, Agustus (2011).

Urbanus Ura Weruin, *Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum*, Jurnal Konstitusi, Volume 14 Nomor 2, Juni (2017).

Tommy Hendra Purwaka, *Penafsiran, Penalaran, dan Argumentasi Hukum yang Rasional*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 40 Nomor 2, (2011).

Website

Damang Averroes Al-Khawarizmi, Penalaran Hukum Induktif, <https://www.negarahukum.com/hukum/penalaran-hukum-deduktif.html> (diakses pada 1 April 2020).

Hak Atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak, <https://spn.or.id/hak-atas-pekerjaan-dan-penghidupan-yang-layak/> (diakses pada 27 Maret 2020).

Idah Rosida, Setiap Orang Berhak Sehat, <https://lbhyogyakarta.org/2012/08/09/setiap-orang-berhak-seha/> (diakses pada 27 Maret 2020).

Institute for Criminal Justice Reform, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, <https://icjr.or.id/deklarasi-universal-hak-asasi-manusia/> (diakses pada 27 Maret 2020).

Mohammad Fadri Denisatria, Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c062fbc83162/mahkamah-konstitusi-sebagai-inegative-legislator-i-dan-ipositive-legislator-i> (diakses pada 27 Maret 2020)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, *Hak Asasi Manusia*, L.N.R.I. 1999 No. 165.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, *Mahkamah Konstitusi*, L.N.R.I. 2003 No. 98.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004, *Praktik Kedokteran*, L.N.R.I. 2004 No.116.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, *Kesehatan*, L.N.R.I. 2009 No.144.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, L.N.R.I. 2011 No.70.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1871/MENKES/PER/IX/2011, *Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 339/MENKES/PER/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi*, B.N.R.I. 2011 No.604.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012.